



Bangun Gedung Dewan Dorong RSU Bangli Pinjam Uang

Bangli (Bali Post)-

Komisi I dan III DPRD Bangli menggelar rapat kerja (raker) dengan manajemen RSU Bangli, Jumat (13/1). Dalam rapat kerja yang dipimpin ketua Komisi I, Wayan Wedana tersebut, dewan meminta agar pihak RSU Bangli dapat terus meningkatkan pelayanan. Selain itu, dewan juga mendorong pihak RSU bisa membangun infrastruktur gedung rumah sakit.

Komisi III DPRD Bangli Made Sudiasa usai mengikuti rapat kerja dengan manajemen RSU Bangli mengatakan, dalam rapat kerja tersebut dewan menginginkan agar RSU Bangli bisa membangun infrastuktur gedung secara modern. Dalam pembangunan gedung, pihak RSU diharapkan tidak melakukannya secara bertahap melainkan sekaligus.

"Karena kalau sekarang bangun ini, tiga tahun lagi bangun itu, jadinya tidak kelar-kelar. Maunya kita RSU Bangli bisa melakukan pembangunan seperti RS Bali Mandara," kata Sudiasa.

Adapun alasan pihaknya mendorong agar RSU Bangli melakukan pembangunan infrastruktur gedung sekaligus, yakni agar pelayanan di RSU Bangli bisa berjalan dengan maksimal. Dengan adanya infrastruktur yang dibangun sekaligus termasuk penyediaan kelengkapan alat kesehatannya, maka RSU Bangli kedepannya bisa melayani pasien dengan optimal. Tidak lagi sedikit-sedikit merujuk pasien ke rumah sakit Sanglah.

Sudiasa mengakui bahwa untuk bisa mewujudkan pembangunan gedung sekaligus, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Untuk menyiasati minimnya anggaran yang dimiliki Bangli saat ini, RSU Bangli yang sudah berstatus badan layanan umum (BLU), menurut Sudiasa bisa melakukan pinjaman uang untuk pembangunan.

"RSU Bangli kan menghasilkan. Kita mendorong untuk melakukan pinjaman. Kita sarankan untuk merancang, berapa pembangunan gedung di rumah sakit dan berapa anggaran yang diperlukan," ujarnya.

Menurut Sudiasa, pihak RSU juga memiliki kesepahaman yang sama dengan dewan. Dari perkiraan awal untuk melengkapi infrastruktur gedung, RSU Bangli membutuhkan sekitar Rp 150 miliar. "Itu sudah termasuk alat kesehatan yang canggih," imbuhnya. (kmb40)

Edisi : Sabtu, 14 Januari 2017

Hal : 8



Belum Sebulan Rampung Jalan Hotmik Belantih-Binyan Rusak

Bangli (Bali Post) -

Proyek perbaikan jalan Belantih-Binyan dengan hotmik yang baru tuntas dikerjakan akhir tahun lalu kini sudah mulai rusak. Tak hanya retak-retak, di beberapa titik aspal hotmik tersebut juga terlihat sudah mengelupas. Penyebab rusaknya aspal jalan, diduga akibat kualitas proyek yang buruk.

Berdasarkan pantauan Jumat (13/1) kemarin, di beberapa titik ruas jalan, kondisi aspal terlihat sudah mulai retak-retak. Tepatnya di Banjar Binyan, terlihat beberapa titik ruas jalan yang kondisinya sudah berlubang karena aspalnya mengelupas.

Tak jauh dari lokasi jalan mengelupas terdapat sebuah papan proyek jalan yang masih terpasang. Sebagaimana yang tertulis di papan, disebutkan bahwa proyek jalan hotmik dengan ruas jalan Belantih-Binyan dan ruas jalan Blancan-Mangguhu diperbaiki dengan anggaran Rp 2,746.342.000. Proyek itu dikerjakan kontraktor pelaksana CV Satya Pramana asal Karangasem. Proyek dengan tanggal kontrak 3 November tersebut dilaksanakan selama 35 hari kalender.

Terkait kerusakan jalan tersebut, Pj. Perbekel Binyan Ketut Sumasana saat dikonfirmasi mengakui hal tersebut. Penyebab mengelupasnya jalan itu, kata Sumasana karena sebelumnya sempat dilalui kendaraan pengangkut material aspal yang mengerjakan proyek jalan di tempat lainnya. "Jalan tersebut masih belum diserahkan," terangnya.

Sementara itu disinggung mengenai upaya tindak lanjut perbaikan kerusakan jalan tersebut, Sumasana mengaku sudah sempat menyampaikannya ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bangli. Hanya saja sampai sekarang belum mendapat respons.

(kmb40)

Edisi : Sabtu, 14 Januari 2017

Hal : 8



Kasus Pipanisasi di Karangasem

Hukuman Naik Drastis, Arnawa Ajukan PK

KASUS dugaan korupsi pipanisasi di Karangasem yang ditangani Reskrim-sus Polda Bali, masih menyisakan persoalan. Dari 9 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, ujung-ujungnya hanya empat orang yang dibawa ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Sisanya ada yang di SP3-kan (proses penyidikannya dihentikan), seperti status mantan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg dan Nopiyanti. Namun pihak kejaksaan yang sudah menerima SPDP Geredeg dan Nopiyanti, hingga saat ini belum ada menerima pemberitahuan SP3 tersebut.

Di sisi lain, kasus yang menjadi supervisi KPK itu hingga saat ini ternyata belum berakhir. Pasalnya, vonis rendah yang diberikan Pengadilan Tipikor Den-

pasar membuat jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Misalnya dengan terdakwa Mantan Kadis Pekerjaan Umum Karangasem, I Wayan Arnawa. Di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) divonis 1,5 tahun, di Pengadilan Tinggi dua tahun, an Mahkamah Agung (MA) justru menghukum dua kali lipatnya. Arnawa divonis bersalah di MA dan dihukum selama empat tahun penjara.

Drastisnya kenaikan hukuman itu, dijadikan dasar Arnawa mengajukan PK (Peninjauan Kembali) dan sidangnya dilakukan Rabu (11/1). Sidang PK di Pengadilan Tipikor dipimpin majelis hakim Sutrisno dengan hakim anggota Wayan Sukanila dan Nurbaya L. Gaol. Sementara pihak kejaksaan, diwakili

JPU Wayan Suardi. "Tadi (kemarin-red) sudah dilakukan sidang PK," jelas Suardi.

Ditanya soal dasar PK dan bukti baru (novum), Wayan Suardi mengatakan tidak ada bukti baru. "Cuma bantahan pendapat saja," elaknya.

Pantauan *Bali Post*, saat sidang Arnawa dikawal petugas Lapas Karangasem. Sejumlah keluarga Arnawa juga tampak hadir untuk memberikan semangat pada mantan Kadis Pekerjaan Umum Karangasem itu. Pihak keluarga membenarkan bahwa dalam kasus ini, pihak kejaksaan mengajukan banding dan kasasi atas putusan di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi. Hingga akhirnya, MA menghukum Arnawa dengan pidana penjara selama empat tahun. (asa)

Edisi : Semn, 16 Januari 2017

Hal : 3



Kelola Dana BOS

Disdikpora Tak Ingin Kasek Terjerat Hukum

Singaraja (Bali Post) -

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tidak ingin kepala sekolah (kasek) di Buleleng terjerat kasus hukum dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menjelang pencairan dana BOS tahun ini, para Kepala Unit Pelaksana Pendidikan (UPP) se-Buleleng dikumpulkan di aula Disdikpora, Senin (16/1) kemarin. Para UPP ini mendiskusikan mekanisme dan regulasi yang mendasari pencairan dan pengelolaan dana BOS.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD Made Astika mengatakan, tahun ini Buleleng mendapatkan jatah BOS SD sebesar Rp 53,195 miliar lebih. Sesuai mekanisme, dana BOS itu direalisasikan dalam empat tahap. Tahap pertama (periode Januari, Februari, dan Maret) dibayarkan 20 persen. Tahap dua (April, Mei, dan Juni) direalisasikan 40

persen. Sedangkan pencairan ketiga sebesar 20 persen (Juli, Agustus, dan September), dan tahap empat (Oktober, November, dan Desember) dibayarkan 20 persen. "Sekarang kepala sekolah sudah menyusun rencana kerja anggaran sekolah (RKAS). Kami secara lisan sudah menyampaikan mekanisme ini harus dipatuhi, termasuk tahapan pencairan-

nya," katanya.

Menurut Astika, kepatuhan kepala sekolah dalam mengikuti juknis pemanfaatan dana BOS ini menjadi perhatian tim yang dibentuk Disdikpora. Pasalnya, dari pengalaman pengelolaan dana BOS tahun-tahun sebelumnya masih ada dokumen RKAS pemanfaatan jatah dana ini tidak mengikuti juknis.

Dia mencontohkan, item anggaran untuk minum harian sekolah. Para guru dan pegawai sudah mendapat tunjangan lauk pauk, harusnya tidak lagi dianggarkan untuk minum harian di sekolah. Selain itu, pembayaran honor juga harus diperhatikan karena kalau tidak disusun dengan cermat bisa saja akan memunculkan temuan pada saat pemeriksaan dokumen keuangan. "Secara berjenjang mulai dari UPP dan kemudian kepala sekolah akan kami kumpulkan agar juknis ini diperhatikan, sehingga harapan kita tidak ada kepala sekolah terjerat kasus hukum," tegasnya. (kmb38)

Edisi : Selasa, 17 Januari 2017

Hal : 11